

Research Article

Optimalisasi Pengelolaan Dana Usaha Desa melalui Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan yang Akuntabel dan Transparan di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Optimization of Village Business Fund Management through the Implementation of Accountable and Transparent Financial Management Principles in Pangauban Village, Pacet District, Bandung Regency

Deri Apriadi*, Asri Sundari, Yulianah, Galuh Boga Kuswara, Kania Laelawati, Merry Fithriani, Nur Fithriani, Mega Zhafarina Purwono, Alpa Alipia Rahmawanti, Bintang Nugroho

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung, Indonesia

**Corresponding Author:*

deriukri08@gmail.com

Submission: Oktober 2025, Revised: November 2025, Accepted: Desember 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan dana usaha desa melalui penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana usaha desa masih menghadapi kendala dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum terstandarisasi serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Upaya optimalisasi dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan, pendampingan teknis, serta penyediaan format laporan keuangan yang sistematis. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terbukti mampu meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Selain itu, keterbukaan informasi keuangan mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana usaha desa. Dengan demikian, optimalisasi manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan berperan penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes serta mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan dana usaha desa, manajemen keuangan, akuntabilitas, transparansi, BUMDes.

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of village business fund management through the application of accountable and transparent financial management principles in Pangauban Village, Pacet District, Bandung Regency. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation of village

How to cite:

Apriadi, D, Dkk. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Dana Usaha Desa melalui Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan yang Akuntabel dan Transparan di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 7 (2): 1 – 9. doi:10.11594/bjpmi.07.02.1

officials, Village-Owned Enterprise (BUMDes) managers, and related parties. The results of the study indicate that the management of village business funds still faces obstacles in the form of unstandardized financial recording and reporting and limited human resource competency. Optimization efforts are carried out through financial management training, technical assistance, and the provision of systematic financial report formats. The application of accountability and transparency principles has been proven to improve the quality of BUMDes financial recording, reporting, and accountability. In addition, the transparency of financial information encourages increased public trust and participation in the supervision of village business fund management. Thus, the optimization of accountable and transparent financial management plays a crucial role in improving BUMDes performance and supporting sustainable village economic development.

Keywords: *Village business fund management, financial management, accountability, transparency, BUMDes.*

Pendahuluan

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa (Una, 2025). Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa adalah dana usaha desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan dana usaha desa yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Se & Rodja, 2025).

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi usaha dengan tujuan utama memperoleh keuntungan yang selanjutnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Riyanti, 2021). Secara konseptual, BUMDes dapat dipahami sebagai badan usaha di tingkat desa, sebagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat daerah. Pembentukan BUMDes merupakan amanat dari Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan,

pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, yang menegaskan bahwa BUMDes didirikan atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong (Karim, 2019). Prinsip tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi desa, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ihsan & Setiyono, 2018).

Keberadaan BUMDes telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun setelah regulasi tersebut diterapkan, peran BUMDes menjadi semakin strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya pendirian BUMDes sebagai salah satu program prioritas Kementerian Desa pada tahun 2017 (Ristawati dkk, 2024). BUMDes diposisikan sebagai instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi nasional, khususnya untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Melalui pengelolaan usaha yang profesional, partisipatif, dan berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tercipta pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Syarifudin & Astuti, 2020).

Pengelolaan dana usaha desa menuntut penerapan prinsip manajemen keuangan yang baik, terutama akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas mengandung makna pertanggungjawaban pengelola dana kepada masyarakat dan pemerintah, sedangkan transparansi menekankan keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan (Malumperas dkk, 2021). Penerapan kedua prinsip tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa dana usaha desa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana usaha desa masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan, lemahnya sistem administrasi dan pelaporan, serta kurangnya pemahaman aparatur desa dan pengelola BUMDes terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan modern (Liani dkk, 2024). Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pengelolaan dana usaha desa dan berdampak pada rendahnya kinerja unit usaha desa.

Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, telah mengembangkan berbagai unit usaha desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana usaha desa di Desa Pangauban diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan strategi optimalisasi yang tepat.

Penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Pangauban tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana usaha desa, tetapi juga untuk membangun tata kelola

pemerintahan desa yang baik (good village governance) (Nurliana, 2023). Dengan tata kelola yang baik, desa diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan (Fadila & Pravitasari, 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan sistem informasi keuangan desa dapat membantu mempercepat proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan (Azahra & Apriadi, 2025). Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat agar pemanfaatan teknologi dapat mendukung terwujudnya pengelolaan dana usaha desa yang transparan dan akuntabel (Safitri & Apriadi, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana optimalisasi pengelolaan dana usaha desa melalui penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan dana usaha desa, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu manajemen keuangan sektor publik dan tata kelola desa. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta pemangku kepentingan lainnya dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan dana usaha desa secara berkelanjutan.

Metode

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dengan fokus pada optimalisasi pengelolaan dana usaha desa melalui penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memperoleh data yang komprehensif serta menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Tahapan penelitian diawali dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Kepala Desa, perangkat desa, serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban terkait tujuan, ruang lingkup, serta manfaat penelitian. Tahap ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama, memperoleh dukungan penuh dari pihak terkait, serta memastikan kelancaran proses pengumpulan data di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Wawancara dilakukan kepada pengelola BUMDes, aparatur desa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana usaha desa guna menggali informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan yang selama ini diterapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata terkait praktik administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, serta tingkat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui tahapan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi aktual pengelolaan dana usaha desa beserta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dilakukan proses identifikasi permasalahan serta analisis kebutuhan terhadap sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip

akuntabilitas dan transparansi. Pada tahap ini, peneliti mengkaji kelengkapan dokumen administrasi keuangan, seperti buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan laba rugi, neraca, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan dana usaha desa yang lebih sistematis dan terstruktur.

Tahap berikutnya adalah perancangan dan pengembangan format dokumen penatausahaan serta pelaporan keuangan BUMDes yang mudah dipahami dan aplikatif. Dokumen tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus mempermudah proses pengawasan dan evaluasi. Penyusunan format laporan keuangan disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh pengelola BUMDes. Pada tahap ini, peneliti juga menyusun pedoman teknis pengelolaan keuangan yang mencakup prosedur pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Selanjutnya, dilakukan kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pengelola BUMDes terkait penerapan sistem penatausahaan dan pelaporan keuangan yang telah dirancang. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui pelatihan, simulasi pencatatan transaksi, serta praktik langsung penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola BUMDes dalam mengelola keuangan secara profesional, sehingga mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara mandiri dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Tahap akhir dari kegiatan penelitian ini adalah evaluasi dan monitoring terhadap penerapan sistem pengelolaan keuangan yang

telah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana usaha desa, tingkat keterbukaan informasi, serta akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan guna mendukung optimalisasi pengelolaan dana usaha desa di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

Hasil dan Pembahasan Kegiatan Pelaksanaan

Program pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan dana usaha desa melalui penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan ini diawali dengan tahapan komunikasi dan koordinasi intensif bersama Kepala Desa, perangkat desa, serta pengurus BUMDes guna menyampaikan maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan penelitian. Pendekatan partisipatif digunakan untuk membangun keterlibatan aktif seluruh pihak terkait, sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa berbasis potensi lokal.

Tahap berikutnya adalah identifikasi awal terhadap permasalahan pengelolaan keuangan BUMDes. Berdasarkan wawancara mendalam dan telaah dokumen administrasi, ditemukan bahwa pencatatan transaksi keuangan belum dilakukan secara sistematis dan konsisten. Sebagian besar transaksi masih dicatat secara sederhana tanpa format baku, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum mampu menggambarkan kondisi keuangan BUMDes secara akurat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sistem pertanggungjawaban keuangan serta rendahnya tingkat transparansi kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Selain itu, laporan keuangan yang disusun oleh pengelola BUMDes belum

sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku bagi entitas usaha desa. Laporan yang tersedia umumnya hanya berupa rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran, tanpa dilengkapi dengan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, maupun laporan hasil usaha yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengelola terhadap prinsip manajemen keuangan yang akuntabel masih terbatas. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan administrasi keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana usaha desa.

Dari aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal. Informasi mengenai penggunaan dana usaha desa dan kinerja keuangan BUMDes masih terbatas pada forum musyawarah desa tertentu dan belum dipublikasikan secara rutin melalui media informasi desa. Akibatnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes relatif rendah. Padahal, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, karena mampu meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong akuntabilitas pengelola dalam menjalankan tugasnya.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pengelolaan dana usaha desa di Desa Pangauban memerlukan penguatan sistem manajemen keuangan yang terstruktur, sederhana, dan mudah diterapkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi dasar, pendampingan teknis, serta penyediaan format laporan keuangan yang standar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kinerja usahanya, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi secara

signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan permasalahan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, dilakukan kegiatan pelatihan teknis yang berfokus pada penguatan kapasitas pengelola dalam bidang manajemen keuangan dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku bagi entitas mikro dan kecil, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang diberikan mencakup teknik pencatatan transaksi keuangan secara kronologis, penyusunan laporan arus kas untuk memantau aliran dana masuk dan keluar, penyusunan laporan posisi keuangan untuk menggambarkan kondisi aset, kewajiban, dan modal, serta penyusunan laporan hasil usaha untuk menilai kinerja keuangan BUMDes secara periodik.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *learning by doing*, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis praktik langsung dengan memanfaatkan data riil dari aktivitas operasional BUMDes di Desa Pangauban. Melalui studi kasus nyata, pengelola BUMDes dilatih untuk mencatat transaksi, mengelompokkan akun, serta menyusun laporan keuangan secara mandiri dan sistematis. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis pengelola, karena peserta dapat langsung mengaplikasikan materi yang diperoleh ke dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan dana usaha desa.

Setelah pelaksanaan pelatihan, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan dan asistensi secara berkala dalam proses

penyusunan laporan keuangan BUMDes. Pendampingan ini dilakukan secara intensif melalui bimbingan langsung, diskusi teknis, serta evaluasi terhadap hasil pencatatan dan pelaporan yang telah disusun oleh pengelola. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah diperkenalkan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan secara konsisten dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, pendampingan juga diarahkan untuk membantu pengelola dalam mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul selama proses implementasi, sehingga tercipta kebiasaan kerja yang tertib administrasi dan berorientasi pada akuntabilitas.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sistem tersebut, peneliti menyediakan format dan template dokumen administrasi keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unit usaha BUMDes di Desa Pangauban. Penyediaan format ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban dana usaha desa. Dengan adanya sistem administrasi keuangan yang terstruktur dan mudah diaplikasikan, diharapkan pengelolaan dana usaha desa dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, penerapan manajemen keuangan yang baik ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja BUMDes, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan terhadap penerapan sistem pengelolaan keuangan yang telah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan dengan menelaah kembali laporan keuangan yang dihasilkan, menilai tingkat ketepatan pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen administrasi, serta konsistensi penerapan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring juga dilakukan melalui observasi langsung dan diskusi reflektif bersama

pengelola BUMDes untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Tahap ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan tidak bersifat sementara, melainkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik pengelolaan dana usaha desa.

Hasil evaluasi dan monitoring menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes di Desa Pangauban. Pengelola BUMDes mulai mampu menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis, tertib, dan mudah dipahami, sehingga mempermudah proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi turut mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang lebih profesional. Dengan demikian, tahap evaluasi dan monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan yang berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan BUMDes serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Pembahasan

Pengelolaan dana usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja kelembagaan dan keberlanjutan usaha desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebelum dilakukan penguatan sistem pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan masih bersifat sederhana, tidak terstruktur, dan belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, rendahnya transparansi, serta lemahnya sistem pertanggungjawaban keuangan.

Penerapan prinsip akuntabilitas terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana usaha desa, terutama melalui perbaikan sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis. Dengan adanya laporan keuangan yang lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, pengelola BUMDes memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja usaha. Temuan ini sejalan dengan konsep tata kelola keuangan sektor publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab pengelola terhadap penggunaan sumber daya publik secara efektif dan efisien.

Dari sisi transparansi, keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas penggunaan dana usaha desa serta capaian kinerja BUMDes, sehingga mendorong terciptanya kontrol sosial yang konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika informasi keuangan disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan usaha desa cenderung meningkat.

Pendampingan dan pelatihan teknis yang diberikan kepada pengelola BUMDes berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen keuangan. Melalui pendekatan *learning by doing*, pengelola tidak hanya memahami konsep dasar akuntansi, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam kegiatan operasional. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan dana usaha desa yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Secara keseluruhan, optimalisasi pengelolaan dana usaha desa melalui

penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Pangauban memberikan implikasi positif terhadap penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kinerja usaha, serta pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong kemandirian desa, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi pengelolaan dana usaha desa melalui penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana usaha desa yang dilakukan oleh BUMDes masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Sebelum dilakukan upaya optimalisasi, sistem administrasi keuangan masih bersifat sederhana, belum terstandarisasi, serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penerapan prinsip manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan format laporan keuangan yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Pengelola BUMDes menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pencatatan transaksi serta menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis, akurat, dan mudah dipahami. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pertanggungjawaban keuangan serta memperkuat kepercayaan pemerintah desa dan masyarakat.

Selain itu, peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat turut mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan

pengembangan usaha desa. Keterbukaan informasi menciptakan kontrol sosial yang konstruktif serta memperkuat tata kelola kelembagaan BUMDes. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan dana usaha desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Referensi

1. Azahra, H., & Apriadi, D. (2025). Pengaruh Penggunaan QRIS dan Gaya Hidup Konsumtif Terhadap Minat Menabung Gen Z di Kota Bandung. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3), 88-102.
2. Fadila, A. P. N., & Pravitasari, D. (2025). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 983-992.
3. Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) gerbang lentera sebagai penggerak desa wisata lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.
4. Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nas Media Pustaka, Makassar*.
5. Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810-4825.
6. Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
7. Nurliana, N. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan

- Keuangan Desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 6(1), 164-173.
8. Ristawati, R., Salman, R., Sukartini, N. M., Pamoro, G. A. J., & Fitriany, S. A. (2024). Optimalisasi BUMDes di Desa Taro Pasca PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 135-148.
 9. Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93.
 10. Safitri, A. M., & Apriadi, D. (2025). Pengaruh Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 347-359.
 11. Se, H., & Rodja, M. C. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Melalui Penerapan Manajemen Modern Dan Inovasi Berkelanjutan Dalam Mengembangkan Ekonomi Desa. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 55-63.
 12. Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi pengembangan BUMDes dalam optimalisasi potensi ekonomi desa dengan pendekatan social entrepreneur di kabupaten kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1).
 13. Una, S. (2025). Pendampingan Pengelolaan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Desa: Studi Kasus Di Desa Palakka Kecamatan Maiwa. *Mallomo: Journal Of Community Service*, 6(1), 710-723.